

INDONESIA DAN INISIATIF KERJASAMA INDO-PASIFIK

by Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D



Indonesia dan Dinamika Regional-Global

- Ada 4 dokumen kebijakan yang menunjukkan bahwa Indonesia ingin berperan penting (leading role) di kawasan Asia Tenggara
 - a. Deklarasi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tahun 2014
 - b. Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2014 - 2019
 - c. Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI Retno L.P. Marsudi Tahun 2018
 - d. Joint Communique of the 51st Asean Foreign Ministers' Meeting in Singapore, 2 August 2018.

China dan aspirasi regional “Indo-Pasifik”

- Jalur maritime dari Belt and Road Initiative (BRI) China menjadikan Laut China Selatan (LCS) sebagai satu-satunya exit melewati Selat Malaka masuk Samudra Hindia dan menjangkau Timur Tengah dan Afrika sebelum mencapai Eropa.
- Kontrol de facto China atas pulau-pulau yang disengketakan di LCS menciptakan masalah keberlakuan dan kewibawaan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) dan menciptakan preseden negative di kawasan Asia Tenggara.
- Kesatuan dan soliditas ASEAN yang dipertanyakan di bawah bayang-bayang penggunaan instrumen ekonomi (dagang, investasi dan pinjaman infrastruktur) oleh China yang menciptakan ketergantungan negara-negara ASEAN.

China's Belt and Road Initiative: Major corridors

-  Silk road economic belt
-  Maritime silk road
-  China-Pakistan economic corridor
-  Bangladesh-China-India-Myanmar economic corridor
-  Trans-Himalayan economic corridor



Source: Carnegie India

Proteksionisme Presiden AS Donald Trump dan prinsip “America First”

- AS telah mundur dari Trans-Pacific Partnership (TPP) meskipun kerjasama dagang ini terus berlangsung tanpa AS. The new name is: Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
- Kepentingan strategis AS di Asia Pasifik tidak berubah meskipun Presiden Trump cenderung menggunakan pendekatan unilateral dan menolak multilateralisme.
- Perang Dagang AS - China terus berlangsung dan membawa dampak negative bagi pertumbuhan ekonomi global dan volatilitas mata uang di emerging markets termasuk Indonesia dengan pelemahan rupiah yang cukup signifikan sejak krisis 1997.
- Pada saat yang sama AS terus memonitor sikap agresif China di LCS dan menyerukan kebebasan navigasi dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Quadilateral Security Dialogue (QSD) sebagai reaksi terhadap BRI China

- QSD merupakan gagasan kerjasama Indo-Pasifik versi AS, Jepang, Australia dan India sebagai sesama negara yang memperjuangkan demokrasi dan keterbukaan serta menjunjung hukum internasional.
- India yang merasa “ketinggalan” dan “terancam” oleh maneuver China di Asia Selatan melalui BRI memperkenalkan “Act East” Policy - menjangkau ASEAN dan Indonesia dan mendukung wacana kerjasama Indo-Pasifik yang diusung Indonesian dan ASEAN.
- Jepang dan Australia sebagai sekutu AS di Asia Pasifik juga merasakan keprihatinan tentang stabilitas kawasan sehubungan dengan sikap agresif China di LCS.





3 konsep kunci dalam buku Vibanshu Shekar (2018):

Emerging power

Status signalling

The Indo-Pacific region

Argumen utama dalam presentasi ini

- Mengutip pendapat Thomas Flemes dan Daniel Wocjzewski (2013) yang mengatakan bahwa strategi kekuatan regional dalam mewujudkan kepemimpinan internasional ditentukan oleh 4 variabel:
 - a. Distribusi kapabilitas material dan penggunaannya
 - b. Kemampuan kekuatan regional untuk memproyeksikan gagasan atau norma (ideational resources)
 - c. Kepentingan nasional kekuatan-kekuatan utama di kawasan dan negara-negara lapis kedua (secondary powers).
 - d. Pengaruh atau dampak negara-negara besar di lingkungan eksternal kawasan.
- Dalam presentasi ini juga ditunjukkan bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui kebijakan luar negeri mempromosikan kepemimpinan internasional Indonesia sambil mengaitkannya dengan prioritas kebijakan dalam negeri demi terwujudnya kepentingan nasional Indonesia.

3 konsep kunci dalam kebijakan luar negeri (Destradi, 2010)

Empire: exclusive interests

Hegemony: exclusive interests

International Leadership: common interests

Strategi RI di kawasan Indo-Pacific

- Deklarasi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan langkah antisipatif untuk menegaskan statusnya sebagai negara kepulauan yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
- Langsung atau tidak langsung aspirasi geopolitik negara-negara besar (AS dan China) akan memengaruhi kedaulatan perairan Indonesia (territorial waters) dan karena itu harus diamankan dan dilindungi. Ada 2 tujuan yang ingin dicapai:
 - a. Pengakuan dunia internasional atas natur Indonesia sebagai negara kepulauan yang dilindungi hukum internasional dan peran strategis RI di Indo-Pasifik
 - b. Keinginan Indonesia membangun inter-island connectivity yang pada gilirannya memperkuat kedaulatan Indonesia atas wilayah perairan yang diakui hukum internasional.

- Posisi Indonesia yang unik dan bisa menjaga jarak yang sama dengan negara-negara besar menciptakan peluang untuk mempertemukan mereka dengan menekankan kepentingan bersama yaitu kemakmuran dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
- Bahkan Indonesia bisa memanfaatkan persaingan antar negara-negara besar dengan menawarkan kerjasama untuk kepentingan yang berbeda. Misalnya: pembangunan kereta cepat JKT - BDG dengan China, pembangunan pelabuhan Patimban dengan Jepang dan pelabuhan Sabang dengan India.
- Kerjasama strategis antara Indonesian dan India setelah kunjungan PM Narendra Modi Juni 2018 merupakan elemen penting untuk stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Kunjungan Modi juga merupakan wujud keseriusan India dengan “Look East Policy”.

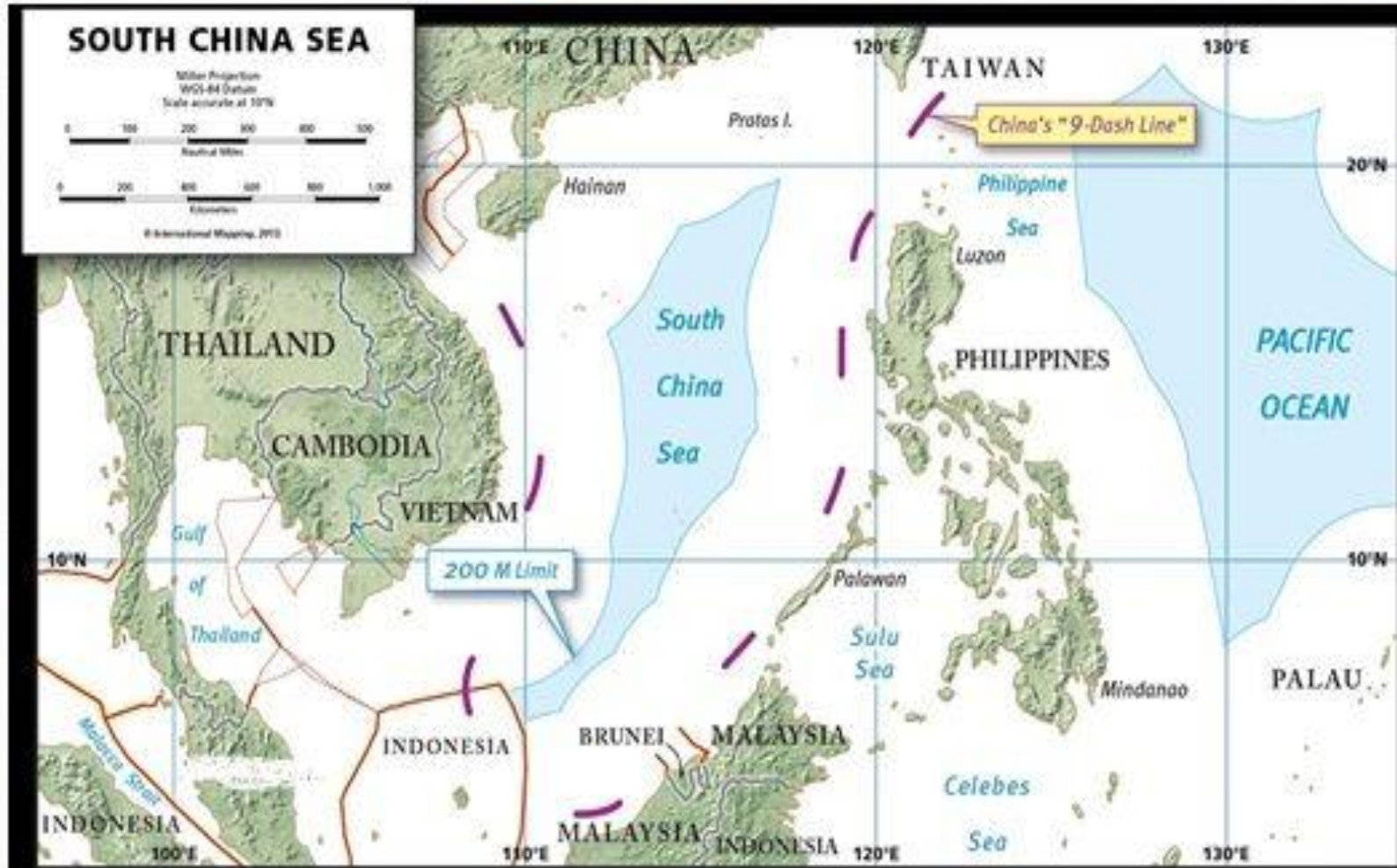
Kerja sama Indo-Pasifik dan sengketa wilayah di LCS

- Gagasan Indonesia untuk kerja sama Indo-Pasifik sebagai “an ecosystem of peace, stability and prosperity”, merupakan perluasan arena diplomasi untuk menetralisasi pendekatan “power politics” China di LCS yang menyebabkan Beijing memiliki de facto control atas pulau-pulau yang disengketakan.
- Nine-dash line yang diklaim China dapat melampaui ZEE Indonesia sekitar Kepulauan Natuna yang oleh Indonesia telah diberi nama Laut Natuna Utara.
- Meskipun ASEAN dan China melanjutkan diplomasi menuju formulasi Code of Conduct di LCS, tetapi terdapat gap interpretasi antara keduanya yang sulit untuk dijabatani.

Interpretasi ASEAN dan China tentang COC di LCS:

ASEAN	CHINA
COC merupakan bagian dari rules-based regional architecture	COC hanya mengatur interaksi antara claimants dan tidak menggugat kontrol de facto China
Penekanan pada ASEAN Centrality dan patuh pada hukum internasional dan kebebasan navigasi	Penyelesaian sengketa wilayah melalui one on one talks
Mengedepankan mekanisme ASEAN seperti EAS, TAC, dan ARF	Menolak keterlibatan kekuatan besar lain khususnya AS
Kapitalisasi seruan normative	Penggunaan instrument ekonomi (trade, FDI dan infrastructure financing)
Menolak militerisasi LCS	Pembangunan infrastruktur militer dan sipil menjamin de facto control
Kepemimpinan ekonomi China (RCEP) lebih disukai daripada hegemony atau empire	Kontrol atas LCS menjadi bagian dari maritime leg of Belt and Road Initiative (BRI).

China's Nine Dash Line





Pertarungan AS dan China di LCS

AS	CHINA
Menghormati hukum internasional dan kebebasan bernavigasi	De facto control atas LCS tidak bisa diganggu gugat
Mendorong ASEAN memperjuangkan tegaknya hukum internasional dan kebebasan navigasi perdagangan internasional	Mengkooptasi ASEAN dan mencegah soliditas yang merugikan kepentingan Beijing
Mengandalkan supremasi militer melalui mobilisasi kekuatan atau armada Indo-Pasifik	Militerisasi LCS dan blue water navy
Nilai-nilai tradisional seperti demokrasi dan HAM	Lebih peduli pada kerjasama ekonomi daripada komitmen terhadap prinsip-prinsip politik universal
Mendukung open and free Indo-Pacific cooperation melalui US-led QSD	Pax Sinica – melalui implementasi BRI (trade, investment and infrastructure financing) dan AIIB

Bagaimana reaksi China?

- China masih lebih fokus pada implementasi BRI (*maritime leg*) dan tidak melihat urgensi kerjasama Indo-Pasifik
- China akan tetap menjaga hubungan yang baik dengan ASEAN yang memiliki nilai strategis baik secara ekonomi, politik maupun keamanan karena penerimaan ASEAN atas kepemimpinan China menentukan legitimasi atas kepemimpinan tersebut di Asia.
- China akan menolak dengan tegas intervensi dari pihak luar (AS) terhadap sengketa wilayah di LCS.

Format kerjasama Indo-Pasifik

- Format kerja sama Indo-Pasifik belum ditentukan karena masih merupakan wacana atau ide meskipun aspirasi geopolitik negara-negara besar yang saling bertentangan membuat ide ini semakin relevan untuk stabilitas kawasan yang merupakan kepentingan semua pihak.
- Pilihan yang paling realistis adalah memanfaatkan mekanisme ASEAN yang sudah berjalan seperti EAS dan TAC karena inisiatif yang datang dari negara besar akan selalu ditolak oleh negara besar lain karena sifatnya yang eksklusif.
- Karena itu KTT ASEAN dan EAS pada bulan November 2018 di Singapore akan menjadi momen yang penting untuk membicarakan masa depan gagasan tersebut.

Simpulan dan penutup

- Dari berbagai dokumen kebijakan terlihat bahwa kepemimpinan regional masih menjadi tema penting dalam kebijakan luar negeri RI pada abad 21.
- Aspirasi geopolitik negara-negara besar yang membentuk diskursus tentang Indo-Pasifik yang pada gilirannya memengaruhi perilaku negara-negara di kawasan ini akan terus berkembang dan meniscayakan perlunya kerja sama agar tidak terjadi konflik yang merugikan semua pihak.
- Indonesia memiliki posisi yang unik karena kemampuannya untuk menjalin hubungan dengan semua negara besar (prinsip bebas aktif), tetapi pada saat yang sama merasa perlu mengamankan kepentingannya nasionalnya terutama terkait kedaulatannya sebagai negara kepulauan yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

- Indonesia telah menyatakan secara terbuka inisiatif untuk membangun kerja sama Indo-Pasifik yang bersifat bebas, terbuka, inklusif dan komprehensif dan mempertahankan mekanisme-mekanisme yang dibangun ASEAN sebagai pilihan kelembagaan yang paling realistis untuk mewadahnya.
- Pada saat yang sama ada upaya dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengaitkan inisiatif kebijakan luar negeri tersebut dengan pencapaian kepentingan nasional Indonesia termasuk penegasan Indonesia sebagai PMD demi kedaulatan RI atas wilayah perairan yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

- Dari sudut pandang kepentingan Indonesia sebagai PMD, promosi kerja sama Indo-Pasifik dapat dilihat sebagai upaya perluasan arena diplomasi di luar ASEAN untuk menetralisasi ambisi China di LCS sehingga tidak menciptakan preseden negative terhadap wibawa UNCLOS.
- Jika mekanisme ASEAN yang digunakan sebagai wadah pelembagaan kerja sama Indo-Pasifik maka luaran kebijakan atau kesepakatan yang dihasilkannya hanya merupakan seruan normative dan tidak akan mengikat. Hasil yang minimalis ini masih lebih baik daripada power politics yang menciptakan ketidakstabilan kawasan yang mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.

References:

- Destradi, S. (2010). Regional powers and their strategies: empire, hegemony and leadership. *Review of International Studies*. Vol. 36, No. 4 (October 2010).
- Flemes, D. and T. Wojczewski. (2011). Contested leadership in comparative perspective: power strategies in South Asia and South America. *Asian Journal of Latin American Studies* Vol. 24 No. 1: 1-27.
- Gale, J. B. and Andrew S. (2018). The Quadrilateral Security Dialogue and the Maritime Silk Road Initiative. *CSIS Briefs*. Retrieved from https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/180717_GaleShearer_QuadSecurityDialogue.pdf?csNA9Z0fB6r4L9KKdBnc.a0LzXdNTr75.
- Jemadu, A. (2014). Commentary: Beyond the virtuous cycle of Indonesia's foreign policy. *The Indonesian Quarterly*, Special Issue 2014, Vol. 42 No. 3-4.
- Reid, A. (2012). Indonesia's new prominence in the world. In Anthony Reid (Ed.) *Indonesia rising: the repositioning of Asia's third giant*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

- Roberts, C. B. et.al. (Eds.). (2015). *Indonesia's ascent: power, leadership and the regional order*. London: Palgrave Macmillan.
- Shekar, V. (2018). *Indonesia's foreign policy and grand strategy in the 21st century: The rise of an Indo-Pacific power*. London: Routledge.
- Shekar, V. (2018). Is Indonesia's 'Indo-Pacific Cooperation' strategy a weak play?. *Pacific Forum*, July 17, 2018.
- Suryadinata, L. (1996). *Indonesia's foreign policy under Soeharto, aspiring international leadership*. Singapore: Times Academic Press.
- Vermonte, P. J. (2014). Commentary: Where is the beef? Indonesia's foreign policy during SBY's Era. *The Indonesian Quarterly*, Special Issue 2014, Vol. 42 No. 3-4.

Terima kasih